

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak Negara Indonesia berdiri, Indonesia telah melakukan pembangunan pada berbagai sektor. Hasilnya Indonesia kini mengalami kemajuan berbagai bidang pembangunan, salah satunya pembangunan ekonomi. Namun demikian, tantangan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah. Hal tersebut karena perubahan ekonomi dunia yang cepat mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap arus perubahan tersebut. Melihat dinamika global tersebut serta memperhatikan potensi dan peluang keunggulan geografi dan sumber daya yang ada di Indonesia, maka dalam kerangka Master Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011 – 2025, Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global. Upaya tersebut harus dimulai melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menuju kemakmuran Indonesia yang lebih merata.

Pembangunan merupakan rangkaian usaha perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa (S.P. Siagian, 2006). Menurut Sudiramunawar (2002) pembangunan diterjemahkan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kemajuan dan memerlukan masukan yang menyeluruh serta berkesinambungan. Kebijakan pembangunan merupakan keputusan publik untuk mewujudkan suatu kondisi sosial yang diharapkan akan dapat mendorong proses pembangunan ke arah yang diinginkan masyarakat, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Target akhir dari kebijakan pembangunan adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara merata (Sjafrizal, 2008).

Pembangunan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendorong berkembangnya pembangunan nasional dan daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang

pemerintahan ke pemerintah daerah otonom guna mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Secara tidak langsung pembangunan daerah perlu ditingkatkan untuk memperkokoh pembangunan nasional itu sendiri. Dalam jangka panjang struktur perekonomian secara nasional menjadi kokoh dan dinamis (Adisasmita, 2013). Keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama (Todaro, 2009).

Hirschman *dalam* Todaro (1989), menyatakan bahwa untuk negara (daerah) yang berkembang, pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak (*imbalanced growth*) namun dilakukan dengan menetapkan sektor unggulan, dimana sektor unggulan ini akan memberi implikasi terhadap sektor-sektor lainnya. Sedangkan menurut Miyarto et al. (1993), dalam pembangunan ekonomi sektoral, prioritas hendaknya diberikan kepada sektor-sektor yang mempunyai daya penyebaran dan derajat kepekaan tinggi.

Pusat pertumbuhan ekonomi (*growth pole*) merupakan salah satu pendekatan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi difokuskan pada daerah yang memiliki potensi tinggi dan fasilitas wilayah yang lebih memadai untuk mempercepat terjadinya persebaran kemajuan ekonomi. Sebab pertumbuhan suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Karakteristik utama sebuah pusat pertumbuhan yaitu: (a) adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu; (b) konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (c) terdapat keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut, dan (d) dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut terdapat sebuah industri induk yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut (Sjahrizal, 2012).

Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi dapat dimulai dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah

tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiplier effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Implementasi dari penciptaan pusat pertumbuhan harus diikuti oleh *trickle down effect* (dampak penetasan ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) melalui aktivitas harmonis antara pusat pertumbuhan dan basis sumber daya di wilayah perdesaan sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya yang juga akan dapat tumbuh (Sugiyanto, 2010).

Pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dalam rangka pengembangan wilayah, maka pemerintah pusat dan daerah harus mampu menentukan wilayah mana yang secara ekonomi dan sosial menjadi prioritas untuk dikembangkan. Prioritas pembangunan mesti dilakukan mengingat anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas, sehingga perlu diprioritaskan untuk daerah yang memiliki potensi cepat berkembang dan memiliki dampak menyebar bagi daerah di sekitarnya. Diharapkan melalui pembangunan wilayah maka anggaran pembangunan dan dampak yang diberikan akan lebih efektif dan efisien. Maka pendekatan pembangunan pertumbuhan wilayah kecamatan diperlukan guna menciptakan pemerataan pembangunan dalam skala kabupaten/kota.

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah (Tarigan, 2005). Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terhadap sektor-sektor yang memiliki keunggulan tersebut.

Salah satu cara untuk memaksimalkan pembangunan wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat terutama Kabupaten Pasaman adalah melalui penentuan pusat pertumbuhan wilayah dan penentuan komoditi basis daerah tersebut. Melalui analisis

penentuan pusat pertumbuhan dan komoditi basis ini dapat ditentukan prioritas pembangunan wilayah dan pengembangan komoditi pertanian unggulan di Kabupaten Pasaman. Hingga saat ini belum ada kajian akademis mengenai potensi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Pasaman. Informasi mengenai penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan rencana dan kebijakan pembangunan, sehingga pembangunan di Kabupaten Pasaman berjalan lebih efisien.

B. Rumusan Masalah

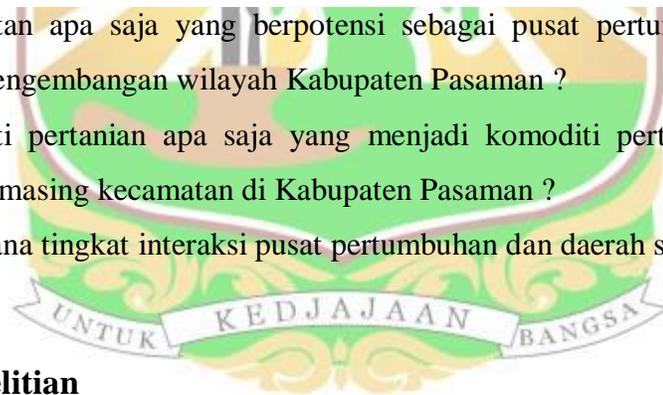
Kabupaten Pasaman tergolong daerah relatif tertinggal. Dimana laju pertumbuhan Kabupaten Pasaman hanya senilai 5,78 persen. Nilai ini lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten di Sumatera Barat yaitu 5,91 persen. Kabupaten Pasaman juga memiliki PDRB perkapita lebih rendah yaitu 22.523.753 rupiah. Nilai ini juga lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten di Sumatera Barat yaitu 28.016.941 rupiah (Lampiran 2, 3, 4 dan 5). Oleh sebab itu diperlukan penentuan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Pasaman agar dapat memacu perkembangan wilayah sehingga terjadi pemerataan perekonomian pada setiap kecamatan. Melalui pemusatan pertumbuhan pada suatu daerah tertentu, maka akan terjadi penyebaran keuntungan ekonomi pada daerah sekitarnya.

Penentuan pusat pertumbuhan wilayah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman 2016-2021. Terdapat enam prioritas pembangunan, salah satunya meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Dari seluruh sektor yang memberikan sumbangan dalam pembentukan PDRB Pasaman atas dasar harga berlaku, sektor pertanian merupakan andil terbesar yaitu 3.343.448,11 juta rupiah (2017) atau 41,53 persen dan tahun 2016 adalah 3.133.557,18 milyar rupiah atau 42,53 persen. Tiga sub sektor pertanian penyumbang PDRB terbesar bagi Kabupaten Pasaman adalah tanaman pangan yaitu 15,57%, tanaman hortikultura tahunan yaitu

12,33%, dan tanaman perkebunan tahunan yaitu 9,69 persen (Pasaman Dalam Angka, 2018).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menetapkan Kabupaten Pasaman sebagai kawasan agropolitan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Tahun 2007 tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2030. Supaya implementasi kebijakan pengembangan sektor pertanian mencapai optimal, maka perlu memilih prioritas pengembangan sub sektor pertanian yang dianggap menjadi basis komoditi Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut maka kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman perlu diidentifikasi untuk mengetahui daerah mana yang akan dijadikan pusat pertumbuhan. Diharapkan penetapan daerah pusat pertumbuhan akan memberikan dampak pembangunan menyebar ke daerah sekitar. Sehingga terjadi pemerataan manfaat pembangunan di setiap wilayah kecamatan. Dari uraian masalah diatas maka timbul pertanyaan sebagai berikut :

1. Kecamatan apa saja yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Pasaman ?
2. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi komoditi pertanian basis pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasaman ?
3. Bagaimana tingkat interaksi pusat pertumbuhan dan daerah sekitarnya ?



C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan daerah di Kabupaten Pasaman.
2. Menganalisis komoditi pertanian basis di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasaman tahun 2016-2018.
3. Mengidentifikasi tingkat interaksi antara pusat pertumbuhan (*growth pole*) dan daerah sekitarnya (*hinterland*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pembangunan dan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman terutama pada kebijakan prioritas pembangunan wilayah dan komoditi unggulan wilayah.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam hal terkait potensi wilayah dengan pembangunan daerah serta sebagai referensi bagi penelitian sejenis

